



Implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Dalam Meningkatkan Legalitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pariaman

Silvina Tri Dewi¹⁾, Aldri Frinaldi²⁾

Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

silvinatridewi88@gmail.com¹⁾, aldri@fis.unp.ac.id²⁾

Abstrak

Implementasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan memperkuat legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi OSS-RBA dalam meningkatkan legalitas UMKM di Kota Pariaman serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA di Kota Pariaman telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas UMKM melalui penyederhanaan prosedur perizinan, percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta peningkatan akses pelaku usaha terhadap layanan perizinan berbasis digital. Namun demikian, implementasi OSS-RBA masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan literasi digital pelaku usaha, kualitas infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, dan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendampingan yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan transformasi digital pelayanan publik.

Kata kunci: OSS-RBA, Legalitas UMKM, Transformasi Digital

Abstract

The implementation of the *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) is part of the digital transformation of public services aimed at improving the ease of doing business and strengthening the legality of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to analyze the implementation of OSS-RBA in improving MSME legality in Pariaman City and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employed a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using the interactive data analysis technique developed by Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of OSS-RBA in Pariaman City has positively contributed to improving MSME legality by simplifying licensing procedures, accelerating the issuance of Business Identification Numbers (NIB), and increasing entrepreneurs' access to digital licensing services. However, several challenges remain, including limited digital literacy among business actors, uneven information technology infrastructure, and the need for stronger inter-agency coordination. Therefore, sustainable assistance strategies and human resource capacity building are essential to support the success of digital transformation in public services.

Keywords: OSS-RBA, MSME Legality, Digital Transformation.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan tingkat pengangguran. UMKM terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi, termasuk krisis ekonomi dan ketidakpastian pasar global. Menurut Tambunan (Tambunan, 2021), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya basis produksi lokal dan meningkatnya aktivitas kewirausahaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penopang ekonomi kerakyatan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Perkembangan UMKM di Indonesia saat ini tidak lagi terbatas pada sektor perdagangan tradisional, melainkan telah merambah sektor industri kreatif, jasa, teknologi, dan ekonomi digital. Transformasi tersebut menuntut pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, profesionalisme manajemen, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Dalam konteks tersebut, digitalisasi dan legalitas usaha menjadi dua aspek fundamental yang menentukan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Sudaryanto et al. (Sudaryanto et al., 2020) menjelaskan bahwa penguatan legalitas usaha dan pemanfaatan teknologi digital merupakan prasyarat utama bagi UMKM untuk dapat berkembang, memperluas akses pasar, dan meningkatkan keberlanjutan usaha.

Meskipun jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, masih banyak pelaku usaha yang beroperasi secara informal tanpa memiliki legalitas usaha yang memadai. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal, program pemberdayaan pemerintah, sertifikasi produk, serta peluang kerja sama dengan sektor usaha yang lebih besar. Rahayu dan Rohman (Rahayu & Rohman, 2022) menegaskan bahwa legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan kepastian usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan investor. Selain itu, Hafni dan Malia (Hafni & Malia, 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan kuantitas UMKM perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas administrasi dan legalitas usaha agar kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Permasalahan legalitas UMKM menjadi semakin penting dalam konteks transformasi ekonomi pascapandemi. Banyak pelaku usaha masih menganggap pengurusan izin sebagai proses yang rumit, memerlukan biaya tinggi, dan memakan waktu yang lama. Akibatnya, sebagian besar UMKM masih berada dalam sektor informal sehingga menyulitkan pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyusunan kebijakan berbasis data yang akurat. Widjaja et al. (Widjaja et al., 2023) menjelaskan bahwa transformasi UMKM dari sektor informal menuju sektor formal merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kemudahan berusaha, Pemerintah Indonesia melakukan penyederhanaan sistem perizinan melalui penerapan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach). Kebijakan ini diimplementasikan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Menurut Arsa dan Rinaldi (Arsa & Rinaldi, 2022), penyederhanaan regulasi dan prosedur perizinan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM.

OSS-RBA merupakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko, yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dalam sistem ini, pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah cukup memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dasar untuk menjalankan usahanya. Sistem tersebut mengubah paradigma pelayanan perizinan dari pendekatan ex-ante regulation menjadi ex-post supervision, yaitu mengedepankan pengawasan

setelah izin diterbitkan. Satriawan et al. (Satriawan et al., 2022) menyebutkan bahwa pendekatan berbasis risiko mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas secara cepat dan transparan.

Implementasi OSS-RBA merupakan bagian dari transformasi digital pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan pemerintah. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha melakukan pendaftaran izin secara mandiri tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Menurut Mergel, Edelmann, dan Haug (Mergel et al., 2019), transformasi digital di sektor publik tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi juga mencakup perubahan proses bisnis, tata kelola, serta penyederhanaan layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia mengembangkan OSS-RBA sebagai sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik guna memberikan kemudahan dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Kementerian Investasi/BKPM (Modal, 2024) menjelaskan bahwa OSS-RBA telah mengintegrasikan proses perizinan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sehingga mampu mempercepat proses penerbitan perizinan serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Namun demikian, keberhasilan implementasi sistem digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta koordinasi antarinstansi pemerintah. Klievink, Bharosa, dan Tan (Klievink et al., 2016) menegaskan bahwa interoperabilitas dan integrasi data antarorganisasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan layanan publik digital yang efektif karena memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, akurat, dan aman. Selain itu, Mergel (Mergel, 2019) menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan memerlukan tata kelola yang adaptif, kolaborasi lintas organisasi, serta kemampuan institusi dalam mengelola perubahan agar layanan digital dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam konteks daerah, Kota Pariaman merupakan salah satu pemerintah daerah yang secara aktif mengimplementasikan OSS-RBA untuk meningkatkan legalitas UMKM. Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Menurut Kementerian Investasi/BKPM (Modal, 2024), pendampingan dan fasilitasi perizinan melalui OSS-RBA menjadi strategi penting untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah dan cepat. Hasil penelitian Duri, Hidayat, dan Sinaga (Duri et al., 2024) juga menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA memberikan dampak positif terhadap kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil karena mampu menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan akses pelaku usaha terhadap layanan pemerintah.

Selain itu, Pemerintah Kota Pariaman juga mengembangkan inovasi layanan jemput bola yang bertujuan menjangkau pelaku usaha di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan digital. Pendekatan pendampingan langsung dan pelayanan yang berorientasi pada pengguna dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas usaha serta memperluas akses terhadap layanan perizinan digital. Menurut OECD (Development, 2020), strategi pendampingan dan peningkatan literasi digital merupakan faktor penting dalam mendorong adopsi layanan digital oleh pelaku usaha kecil dan menengah sehingga transformasi digital dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi OSS-RBA di Kota Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan literasi digital pelaku UMKM, gangguan jaringan internet, ketidaksesuaian data usaha, serta kendala sinkronisasi sistem antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih memerlukan berbagai upaya penguatan pada aspek teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi OSS-RBA pada beberapa daerah di Indonesia dengan fokus pada aspek investasi, reformasi birokrasi, dan digitalisasi pelayanan publik. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada wilayah perkotaan besar dan daerah dengan tingkat kesiapan digital yang relatif tinggi. Kajian mengenai implementasi OSS-RBA dalam meningkatkan legalitas UMKM pada daerah pesisir dan kota kecil dengan karakteristik UMKM tradisional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait efektivitas implementasi OSS-RBA dalam mendorong legalisasi UMKM pada daerah yang memiliki tingkat literasi digital dan kapasitas infrastruktur yang beragam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan OSS-RBA dalam meningkatkan legalitas UMKM di Kota Pariaman menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada identifikasi inovasi layanan jemput bola digital sebagai faktor strategis yang berperan dalam mempercepat legalisasi UMKM melalui implementasi OSS-RBA pada pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan berbasis digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dalam meningkatkan legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pariaman. Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada fenomena implementasi kebijakan dalam konteks tertentu, yaitu penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko oleh pemerintah daerah.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap implementasi OSS-RBA. Informan penelitian meliputi pejabat struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pariaman, operator layanan OSS-RBA, serta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS-RBA. Untuk menjaga kerahasiaan dan etika penelitian, identitas informan disajikan secara anonim sesuai dengan kode atau jabatan masing-masing.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan DPMPTSP Kota Pariaman, data statistik penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman, laporan OSS Nasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku administrasi publik, serta hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan telaah literatur secara sistematis. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai proses implementasi OSS-RBA, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan legalitas UMKM. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (Miles et al., 2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions).

Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dipilih karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan secara komprehensif.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen resmi, dan berbagai literatur yang relevan sehingga diperoleh temuan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum UMKM di Kota Pariaman

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi UMKM cukup besar dengan karakteristik ekonomi yang didominasi oleh sektor perdagangan, kuliner, pariwisata, kerajinan, dan pengolahan hasil perikanan. Perkembangan sektor UMKM menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah Kota Pariaman menempatkan pengembangan UMKM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan legalitas usaha. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala, terutama rendahnya tingkat legalitas usaha, keterbatasan literasi digital, dan minimnya pemahaman administrasi bisnis.

Tabel 1. Karakteristik UMKM di Kota Pariaman

Aspek	Kondisi
Sektor Dominan	Kuliner, perdagangan, kerajinan, perikanan
Skala Usaha	Didominasi usaha mikro dan kecil
Sebaran Wilayah	4 Kecamatan di Kota Pariaman
Kendala Utama	Modal, legalitas usaha, literasi digital
Potensi Pengembangan	Pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi usaha

Sumber : Peneliti 2026

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan legalitas usaha menjadi kebutuhan mendasar bagi UMKM dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Kepemilikan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap sumber pembiayaan formal, program pemberdayaan pemerintah, sertifikasi produk, serta peluang kemitraan dengan sektor usaha yang lebih besar. Dari perspektif tata kelola publik, legalitas usaha juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas basis data UMKM yang diperlukan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah berbasis bukti (evidence-based policy). Kondisi ini menunjukkan bahwa legalisasi UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha secara individual, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi OSS-RBA dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya menyederhanakan proses perizinan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor UMKM yang formal dan berdaya saing.

Implementasi OSS-RB di Kota Pariaman Analisis Model Edward III

Implementasi OSS-RBA dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tabel 2. Analisis Implementasi OSS-RBA Berdasarkan Model Edward III

Dimensi Edward III	Temuan Penelitian	Analisis
Komunikasi	Sosialisasi melalui media sosial, bimbingan teknis, dan	Informasi kebijakan tersampaikan secara jelas sehingga meningkatkan



	pendampingan lapangan	pemahaman UMKM terhadap OSS-RBA
Sumber Daya	Tersedia operator OSS, komputer pelayanan, dan MPP	Mendukung percepatan layanan, namun masih terkendala jaringan internet
Disposisi	Aparatur memiliki komitmen tinggi dan responsif terhadap pengguna	Mempercepat adopsi sistem OSS-RBA dan meningkatkan kepuasan masyarakat
Struktur Birokrasi	SOP jelas dan pelayanan terpadu satu pintu	Mengurangi tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan efisiensi pelayanan
Sumber : Peneliti 2026		

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan proses menerjemahkan keputusan politik menjadi tindakan nyata yang menghasilkan dampak bagi masyarakat. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

a. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan OSS-RBA di Kota Pariaman telah dilaksanakan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, bimbingan teknis, konsultasi tatap muka, serta kegiatan sosialisasi langsung ke desa dan kelurahan. Strategi komunikasi yang beragam tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai prosedur perizinan berbasis risiko serta manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menurut Edward III, komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut relatif telah terpenuhi. Informasi mengenai prosedur OSS-RBA disampaikan secara berkelanjutan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga mampu mengurangi kesalahan dalam proses pendaftaran. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam mengkomunikasikan perubahan kebijakan kepada masyarakat secara inklusif dan berkesinambungan.

b. Sumber Daya

Variabel sumber daya menunjukkan bahwa implementasi OSS-RBA didukung oleh keberadaan operator yang kompeten, fasilitas komputer pelayanan, serta tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan terpadu. Dukungan sumber daya tersebut mempercepat proses penerbitan NIB dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perizinan.

Namun demikian, penelitian menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan jaringan internet dan gangguan sistem OSS pusat (downtime) yang terjadi pada waktu tertentu. Ketika terjadi gangguan sistem, DPMPSTP Kota Pariaman menerapkan langkah diskresioner berupa pelayanan konsultasi offline, verifikasi dokumen secara manual, serta pencatatan data calon pemohon untuk kemudian diinput kembali setelah sistem OSS kembali normal. Langkah ini menunjukkan adanya fleksibilitas birokrasi dalam menjaga kontinuitas pelayanan publik. Dari perspektif implementasi kebijakan, kemampuan aparatur untuk beradaptasi terhadap hambatan teknis merupakan bentuk kapasitas institusional yang penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam implementasi OSS-

RBA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya DPMPSTSP Kota Pariaman memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan tanpa pungutan biaya tambahan. Sikap responsif aparaturnya tercermin dari kesediaan mereka mendampingi pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun pengisian data usaha.

Edward III menegaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana memiliki pemahaman dan komitmen terhadap tujuan kebijakan. Dalam konteks OSS-RBA, komitmen aparaturnya tidak hanya mendorong keberhasilan adopsi sistem digital, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Dengan demikian, disposisi yang positif menjadi modal sosial penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di DPMPSTSP Kota Pariaman telah disesuaikan dengan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu sehingga alur pelayanan menjadi lebih sederhana dan terkoordinasi. Pembagian tugas antara bagian pendaftaran, verifikasi, dan pengawasan telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

Menurut Edward III, struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya prosedur yang sederhana dan minim fragmentasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat tumpang tindih kewenangan yang signifikan dalam proses penerbitan izin melalui OSS-RBA. Kondisi tersebut memungkinkan pelayanan berjalan lebih efisien, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan kepastian waktu pelayanan bagi masyarakat.

Faktor Pendukung dan Hambatan Implementasi OSS-RBA

Salah satu faktor pendukung implementasi OSS-RBA di Kota Pariaman adalah adanya inovasi pelayanan "Jemput Bola". Melalui inovasi ini, petugas DPMPSTSP secara aktif mendatangi pasar tradisional, sentra UMKM, dan wilayah kelurahan untuk memberikan pendampingan serta membantu penerbitan NIB secara langsung di lokasi usaha. Inovasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pelayanan publik dari pendekatan pasif menjadi pelayanan yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif Public Policy Innovation, inovasi pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi baru, tetapi juga mencakup perubahan metode pelayanan yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi masyarakat. Program Jemput Bola yang diterapkan di Kota Pariaman merupakan bentuk inovasi administratif dan inovasi pelayanan yang mampu mengurangi hambatan geografis maupun administratif yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Temuan ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi publik dalam menciptakan model pelayanan yang adaptif dan inklusif.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa hambatan implementasi OSS-RBA, antara lain rendahnya literasi digital pelaku usaha, ketidakakuratan pengisian data usaha, serta kendala teknis pada sistem OSS pusat. Hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan digital (digital divide) yang masih dialami sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM mikro dan kelompok usia lanjut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi digital pelayanan publik harus diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat agar tidak menimbulkan eksklusi sosial dalam memperoleh pelayanan publik.

Capaian Peningkatan Legalitas UMKM

Implementasi OSS-RBA memberikan dampak positif terhadap peningkatan legalitas UMKM di Kota Pariaman. Kemudahan proses perizinan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah daerah berhasil meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk memperoleh legalitas formal melalui penerbitan NIB.

Gambar 1. Tren Peningkatan Legalitas UMKM melalui Penerbitan NIB di Kota Pariaman Tahun 2021-2025



Berdasarkan Gambar 1, jumlah penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM di Kota Pariaman menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 jumlah NIB yang diterbitkan tercatat sebanyak 132 NIB. Angka tersebut meningkat tajam menjadi 668 NIB pada tahun 2022 atau meningkat sekitar 406,1%. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan jumlah 1.086 NIB atau tumbuh sebesar 62,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah penerbitan mencapai 2.114 NIB, meningkat sekitar 94,7% dibandingkan tahun 2023.

Peningkatan jumlah NIB tersebut menunjukkan bahwa implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) memberikan dampak positif terhadap legalitas usaha UMKM di Kota Pariaman. Penyederhanaan prosedur perizinan, integrasi layanan secara digital, serta adanya pendampingan dari pemerintah daerah melalui DPMPSTP menjadi faktor yang mendorong semakin banyak pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya secara formal. Selain itu, inovasi pelayanan Jemput Bola yang dilakukan dengan mendatangi sentra UMKM dan pasar tradisional turut memperluas akses masyarakat terhadap layanan perizinan sehingga mampu meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha.

Pada tahun 2025, jumlah penerbitan NIB tercatat sebanyak 1.388 NIB atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan menurunnya efektivitas implementasi OSS-RBA. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti telah tingginya jumlah UMKM yang memperoleh legalitas pada tahun sebelumnya, perubahan dinamika pendaftaran usaha baru, maupun faktor teknis terkait sistem OSS nasional. Meskipun demikian, secara kumulatif tren penerbitan NIB selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan kondisi awal implementasi kebijakan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa OSS-RBA tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan perizinan, tetapi juga menjadi sarana transformasi tata kelola pelayanan publik yang mampu meningkatkan inklusi ekonomi dan memperkuat basis data UMKM di daerah. Dengan semakin banyaknya UMKM yang memiliki legalitas usaha, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk menyusun kebijakan pemberdayaan yang tepat sasaran, berbasis data, dan berorientasi pada penguatan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Dari perspektif citizenship, implementasi OSS-RBA dapat dipandang sebagai upaya negara dalam memenuhi hak kewarganegaraan ekonomi (economic citizenship) bagi pelaku UMKM. Kepemilikan legalitas usaha melalui NIB memberikan akses yang lebih setara terhadap sumber pembiayaan, perlindungan hukum, program pemberdayaan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan perizinan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperluas akses warga negara terhadap hak-hak ekonomi yang dijamin oleh negara.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak kewarganegaraan ekonomi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan literasi digital. Sebagian pelaku UMKM, terutama kelompok usia lanjut dan usaha mikro tradisional, mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital maupun memahami prosedur OSS-RBA secara mandiri. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bentuk baru ketimpangan akses pelayanan publik di era digital society. Oleh karena itu, transformasi digital pelayanan publik harus disertai dengan kebijakan yang inklusif, seperti pendampingan intensif, pelatihan literasi digital, serta inovasi pelayanan Jemput Bola agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak-hak ekonomi dan pelayanan publik yang berkualitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dalam meningkatkan legalitas UMKM di Kota Pariaman menunjukkan hasil yang positif dan memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi pelayanan perizinan berusaha berbasis digital. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi OSS-RBA dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan lapangan telah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha. Selain itu, dukungan sumber daya berupa ketersediaan operator, sarana prasarana pelayanan, serta komitmen aparatur yang tinggi mampu mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Struktur birokrasi yang didukung oleh mekanisme pelayanan terpadu satu pintu dan prosedur operasional yang jelas juga berkontribusi dalam menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa OSS-RBA tidak hanya mempermudah proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), tetapi turut memperkuat tata kelola pemerintahan digital dan pengembangan ekosistem UMKM yang lebih formal dan berdaya saing. Kemudahan akses perizinan melalui sistem digital telah mendorong peningkatan jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha, sehingga membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan, sertifikasi produk, program pemberdayaan pemerintah, dan kemitraan usaha. Namun demikian, implementasi OSS-RBA masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya literasi digital sebagian pelaku UMKM, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kendala teknis pada sistem OSS yang terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, peningkatan kualitas infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan ini di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pariaman, perlu terus memperkuat strategi sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM secara berkelanjutan, terutama bagi kelompok usaha mikro yang memiliki keterbatasan literasi digital. Program pendampingan berbasis komunitas, pelatihan penggunaan sistem OSS-RBA, serta pengembangan inovasi



layanan jemput bola perlu diperluas agar seluruh pelaku usaha dapat memperoleh akses legalitas secara mudah dan merata. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, penguatan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah, serta penyempurnaan sistem OSS-RBA agar pelayanan perizinan dapat berjalan lebih stabil, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara empiris pengaruh implementasi OSS-RBA terhadap peningkatan kinerja UMKM, pertumbuhan ekonomi daerah, dan tingkat kepuasan masyarakat sehingga dapat memperkaya kajian mengenai transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsa, R., & Rinaldi, A. (2022). Reformasi birokrasi dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 120–135.
- Development, O. for E. C. and. (2020). *OECD digital government index (DGI): Methodology and 2019 results*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/4de9f5bb-en>
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Effectiveness of the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA): Innovation in licensing for micro and small businesses in urban areas. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–116. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-116>
- Hafni, R., & Malia, S. (2021). Penguatan UMKM dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Klievink, B., Bharosa, N., & Tan, Y.-H. (2016). The collaborative realization of public values and business goals: Governance and infrastructure of public–private information platforms. *Government Information Quarterly*, 33(1), 67–79. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.12.002>
- Mergel, I. (2019). Digital service teams in government. *Government Information Quarterly*, 36(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.001>
- Mergel, I., Edelman, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Modal, K. I. K. P. (2024). *Three years on, Risk-Based OSS issues 10 million Business Identification Numbers*. BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/info/siaran-pers/three-years-on-risk-based-oss-issues-10-million-business-identification-numbers>
- Rahayu, S., & Rohman, A. (2022). Legalitas usaha sebagai instrumen peningkatan daya saing UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*.
- Satriawan, B., Nugroho, D., & Arifin, M. (2022). Risk-based approach in business licensing reform: Evidence from Indonesia. *Public Policy Review*.
- Sudaryanto, H., Wijaya, A., & Prasetyo, D. (2020). Digitalization and competitiveness of MSMEs in Indonesia. *International Journal of Business and Society*.
- Tambunan, T. (2021). *UMKM di Indonesia: Perkembangan, tantangan, dan prospek*. Prenada Media Group.
- Widjaja, H., Saputra, A., & Ningsih, R. (2023). Formalization of MSMEs and regional economic resilience in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional*.